



Geopolitik Indonesia dalam Landasan Idil Pancasila

Firdianti¹, Fredik L. Kollo², Anjulin Y. Kamiasi³, Maria Cindiany Baru⁴, Maria Kartika Jinas⁵, Irfan H. Olo⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: firdiantikribo@gmail.com (corresponding Author)

Abstract. *This study stems from the fact that increasingly complex global geopolitical developments require Indonesia to have a strategic orientation rooted in the values of Pancasila. This study aims to analyse the relationship between Indonesian geopolitics and the idealistic foundation of Pancasila as a moral and ideological basis for shaping national policy direction. The method used in this study is library research with a descriptive-analytical approach, which involves analysing various relevant scientific literature, books, and academic articles to gain a deep conceptual understanding. The results of the study show that Pancasila functions as a moral and ideological guideline that guides the Indonesian people in viewing the archipelago as a whole and determining the direction of political, economic, social, and defence policies oriented towards unity, justice, and the welfare of the people. In addition, the values of Pancasila also serve as an ethical foundation in facing various modern geopolitical challenges so that national policies remain consistent with the values of humanity and social justice. Thus, Indonesia's geopolitics based on Pancasila reflects the identity of a sovereign nation with character that upholds world peace.*

Keywords: Geopolitics, Indonesia, Pancasila.

I. Pendahuluan

Kajian mengenai geopolitik Indonesia yang didasarkan pada ideologi Pancasila merupakan upaya ilmiah yang mendalami hubungan antara aspek geografis, politik, dan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Geopolitik tidak hanya dipahami sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan atau menguasai wilayah, melainkan juga sebagai bentuk refleksi dari pandangan hidup bangsa dalam mengelola ruang kekuasaan secara adil dan beretika. Pancasila sebagai ideologi nasional memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan geopolitik Indonesia, karena nilai-nilainya berfungsi sebagai dasar moral, pedoman etika, dan arah normatif untuk pembangunan nasional yang mandiri dan bermartabat (Hatta, 2018).

Pancasila memiliki peranan penting dalam memberikan dasar filosofis bagi penyusunan strategi geopolitik yang tidak hanya menekankan aspek kekuasaan, tetapi juga berupaya memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan di antarabangsa. Paradigma geopolitik Indonesia yang berlandaskan Pancasila menolak dominasi kekuatan militer secara mutlak, sebaliknya menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan tanggung jawab global terhadap perdamaian dunia. Pemikiran ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi ciri khas diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dengan

demikian, geopolitik nasional berfungsi sebagai alat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang kebijakan yang mengatur hubungan antarwilayah, pengelolaan sumber daya, serta strategi pertahanan dan keamanan nasional (Suryokusumo, 2017).

Pemahaman mengenai konsep wawasan nusantara merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks ini karena menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dalam berbagai aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan ini tidak hanya mencerminkan bentuk wilayah kepulauan, tetapi juga menciptakan nilai persatuan dan keutuhan bangsa sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila. Perspektif ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia memiliki dasar ideologis yang berbeda dari konsep geopolitik negara-negara lain yang cenderung berfokus pada ekspansi dan hegemoni kekuatan (Soedjatmoko, 2019).

Adanya fenomena globalisasi serta perkembangan teknologi digital memberikan tantangan baru terhadap kekuatan nasional, terutama melalui munculnya ancaman nonmiliter seperti disinformasi, infiltrasi ideologi asing, serta perang siber. Ancaman-ancaman ini berpotensi melemahkan integrasi nasional dan menurunkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam situasi seperti ini, negara diharuskan untuk menyusun strategi geopolitik yang mampu beradaptasi, tangguh, sekaligus tetap berakar pada jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kebijakan pertahanan nonmiliter, diplomasi digital, serta pengelolaan ruang siber, agar ketahanan ideologis dapat terjaga secara berkelanjutan (Winarno, 2022).

Pancasila sebagai dasar negara menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan bangsa Indonesia (Kamlasi et.al, 2025). Dalam konteks geopolitik Indonesia, setidaknya terdapat tiga latar belakang utama yang mengharuskan agar Pancasila sebagai landasan idil geopolitik yakni Pertama, meningkatnya dinamika politik global serta persaingan antar negara di kawasan Indo-Pasifik menuntut Indonesia memiliki arah geopolitik yang jelas dan didasarkan pada nilai-nilai nasional. Pancasila menjadi landasan moral yang membantu menjaga agar kebijakan geopolitik tidak menyimpang dari tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Latif, 2020). Kedua, perkembangan era digital menimbulkan ancaman ideologis yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan, sehingga kajian ini penting untuk menegaskan kembali peran Pancasila sebagai filter ideologi dalam menjawab pengaruh global yang bersifat merusak (Sukma, 2021). Ketiga, masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan konsep geopolitik dengan nilai-nilai Pancasila secara praktis menyebabkan kekosongan teoritis yang perlu diisi melalui kajian yang sistematis serta berbasis data konseptual (Wibisono, 2021).

Kajian mengenai geopolitik dalam perspektif Pancasila memiliki urgensi praktis bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Pancasila menuntun arah pembangunan nasional agar tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara. Dalam konteks geopolitik, prinsip keadilan ini berimplikasi pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam, distribusi pembangunan antarwilayah, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Dengan demikian, geopolitik Indonesia yang berlandaskan Pancasila mencerminkan paradigma pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Wibowo, 2020).

Nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting diartikulasikan dalam praktik geopolitik Indonesia, menelaah hubungan antara ideologi, strategi ruang, dan kebijakan nasional, serta



menilai sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila dapat memperkuat ketahanan ideologis bangsa di tengah arus globalisasi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori geopolitik berbasis nilai-nilai luhur bangsa serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk membangun paradigma geopolitik yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional (Riyadi, 2022).

Kajian hubungan antara Pancasila dan geopolitik memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana sistem nilai dapat diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan nasional. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas ideologis bangsa di tengah kompetisi global yang sarat dengan kepentingan kekuatan besar. Pancasila sebagai landasan ideal akan tetap relevan apabila mampu menjadi rujukan normatif bagi pembangunan geopolitik yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia (Hardiman, 2023).

pendekatan teori tersebut harapannya dapat menciptakan kemandirian desa yang terarah, partisipatif, serta mampu memberikan pemahaman terhadap pelaku adat istiadat terhadap fungsi LAD guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna membantu dalam penanggulangan kemiskinan

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola pendekatan normatif-filosofis dan konseptual. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan ideologis dan moral dalam pembentukan arah geopolitik Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada upaya memahami prinsip-prinsip normatif Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, dalam konteks pengelolaan wilayah dan hubungan internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji teori-teori geopolitik baik klasik maupun modern, kemudian mengaitkannya dengan kondisi dan strategi geopolitik Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana ideologi Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan geopolitik nasional (Moleong, 2019; Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur (library research) dan dokumentasi. Kajian literatur mencakup kegiatan membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai karya ilmiah, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema geopolitik dan Pancasila. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, serta kebijakan strategis pemerintah di bidang pertahanan dan ketahanan nasional. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menjamin keakuratan serta relevansi sumber dengan fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan negara. Penggunaan data sekunder dianggap tepat karena penelitian ini bersifat konseptual dan tidak



melibatkan observasi lapangan. Pemilihan sumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih bahan bacaan dan dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, sehingga hasil kajian memiliki kedalaman analisis yang kuat (Sugiyono, 2020).

Data yang diperoleh kemudian disajikan dengan metode deskriptif-analitis, yakni melalui proses interpretasi dan analisis logis terhadap berbagai konsep dan teori yang dikaji. Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dan membuang yang tidak berkaitan dengan fokus kajian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur sesuai tema-tema pembahasan, seperti nilai dasar Pancasila, teori geopolitik, dan penerapan geopolitik Indonesia dalam konteks global. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hubungan konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan strategi geopolitik nasional untuk membangun paradigma geopolitik yang berkeadilan dan berdaulat (Miles et al., 2014).

III. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental sebagai fondasi ideologis utama dalam pembentukan arah geopolitik Indonesia. Setiap sila Pancasila memuat makna strategis yang menjadi acuan bagi formulasi kebijakan nasional. Sila Ketuhanan mengandung nilai etika moral yang menuntun penggunaan kekuasaan negara secara beradab; sila Kemanusiaan menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia; sila Persatuan meneguhkan urgensi integrasi nasional; sila Kerakyatan mendorong proses pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah; sedangkan sila Keadilan menegaskan pentingnya pemerataan dalam pengelolaan kekuasaan dan sumber daya nasional. Makna substantif dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia tidak didasarkan pada ambisi kekuasaan, melainkan berakar pada nilai moral dan kemanusiaan yang bersumber dari ideologi bangsa (Hatta, 2018; Latif, 2020).

Secara filosofis, Pancasila menyediakan kerangka etis yang mengarahkan pelaksanaan geopolitik nasional agar berjalan seimbang antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Setiap sila Pancasila memiliki implikasi praktis dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, serta pembangunan nasional. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan menekankan diplomasi damai dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan internasional, sedangkan sila Persatuan dan Kerakyatan memperkuat solidaritas nasional dan musyawarah sebagai prinsip penyelesaian konflik. Prinsip Keadilan Sosial memberikan pijakan dalam pemerataan hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, sehingga mendorong kemandirian serta kesejahteraan kolektif (Suryokusumo, 2017; Wibowo, 2020).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam geopolitik berperan pula sebagai benteng ideologis terhadap tantangan globalisasi, kolonialisme modern, dan penetrasi budaya asing. Dalam konteks global saat ini, Pancasila mempertegas identitas nasional yang membedakan Indonesia dari ideologi dan sistem politik negara lain. Fondasi ideologis ini menjadi modal strategis dalam menjaga kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya bangsa di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Melalui pendekatan geopolitik yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat merancang strategi pembangunan yang tidak hanya



berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pemerataan, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kompas etis dan ideologis dalam membangun politik kebangsaan yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial (Riyadi, 2022; Hardiman, 2023).

Integrasi Nilai Pancasila dalam Konsep Wawasan Nusantara

Konsep Wawasan Nusantara merepresentasikan penerapan konkret nilai-nilai fundamental Pancasila dalam dimensi geopolitik Indonesia. Hasil kajian ilmiah memperlihatkan bahwa gagasan ini menegaskan kedudukan Indonesia sebagai entitas tunggal yang menyatukan dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional (Soedjatmoko, 2019). Wilayah Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai entitas ideologis yang perlu dijaga melalui semangat persatuan, pemerataan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berperan sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan sumber daya nasional agar tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, melainkan juga menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Geopolitik nasional berpijak pada prinsip keseimbangan antara kepentingan domestik dan tanggung jawab global. Prinsip ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang termuat dalam sila ketiga Pancasila, yang menekankan pentingnya harmoni dalam keberagaman serta solidaritas antarwilayah di dalam satu kesatuan bangsa (Suryokusumo, 2017). Pandangan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Penerapan nilai Pancasila dalam Wawasan Nusantara juga merefleksikan upaya menjaga keutuhan ideologi bangsa di tengah dinamika globalisasi. Globalisasi membawa dampak pada meningkatnya interaksi lintas budaya dan ekonomi, sehingga diperlukan paradigma geopolitik yang menegaskan identitas nasional sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia modern (Wibisono, 2021). Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara berfungsi tidak hanya sebagai doktrin pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif.

Nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam Wawasan Nusantara berkontribusi pada pembentukan pola pikir strategis bangsa dalam mengelola wilayah dan sumber daya secara berkelanjutan. Prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi fondasi moral dalam kebijakan pembangunan dan pemerataan hasil ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Hardiman, 2023). Geopolitik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut mencerminkan identitas bangsa yang menolak hegemoni dan mendorong kerja sama internasional yang setara serta berorientasi pada perdamaian dunia.

Pancasila dan Tantangan Geopolitik Global

Kajian terhadap tantangan geopolitik global menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai pijakan ideologis dalam menghadapi perubahan konstelasi politik internasional yang semakin kompleks. Persaingan dalam perebutan sumber daya alam, konflik teritorial, serta rivalitas antar kekuatan besar menuntut Indonesia untuk memiliki fondasi moral yang kokoh dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai pedoman etis dalam mengatur interaksi antarnegara yang didasarkan pada keadilan dan perdamaian dunia. Nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam sila kedua memberikan arah bagi diplomasi Indonesia agar lebih



menonjolkan pendekatan dialog, kerja sama multilateral, dan penyelesaian konflik secara damai tanpa mengedepankan kekuatan militer (Winarno, 2022).

Peranan Pancasila tidak hanya terbatas pada tataran ideologis domestik, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Ideologi ini menjadi dasar moral bagi pelaksanaan prinsip politik bebas aktif yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan tanggung jawab global terhadap perdamaian dan keadilan internasional. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang bersumber dari Pancasila tercermin dalam diplomasi Indonesia di forum global yang selalu menolak hegemoni, kolonialisme, dan dominasi ekonomi politik negara-negara besar. Paradigma ini memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat, terbuka terhadap kerja sama internasional, namun tetap menjunjung kemandirian dan integritas nasional (Sukma, 2021).

Keterkaitan antara Pancasila dan geopolitik global juga semakin relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perang siber, ketimpangan ekonomi global, dan krisis lingkungan. Nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menjadi panduan dalam membentuk kebijakan luar negeri yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada perdamaian berkelanjutan. Pancasila memastikan agar strategi geopolitik Indonesia tidak hanya difokuskan pada kepentingan kekuasaan, tetapi juga berpijak pada nilai moral universal yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pelaku aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan beradab. Dengan demikian, eksistensi Pancasila di era globalisasi bukan sekadar simbol ideologis, tetapi fondasi etik yang menentukan arah geopolitik nasional dalam konteks dunia yang terus berubah (Riyadi, 2022).

Geopolitik Digital dan Ketahanan Ideologis Bangsa

Kajian mengenai geopolitik digital menyoroti dinamika baru dalam hubungan internasional yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga mencakup pengaruh ideologi dan penguasaan informasi di dunia maya. Fenomena global seperti disinformasi, polarisasi sosial, dan penyebaran nilai-nilai asing melalui media digital telah menjadi instrumen geopolitik yang dapat mengancam keutuhan ideologis bangsa. Pancasila berperan sebagai filter moral dan panduan nilai untuk menjaga agar arus informasi global tetap sejalan dengan identitas nasional serta memperkuat ketahanan ideologis masyarakat (Latif, 2020).

Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab berfungsi sebagai landasan etis dalam memperkuat literasi ideologis di kalangan generasi muda. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi langkah strategis dalam mencegah penyusupan ideologi ekstrem dan liberalisme radikal yang dapat melemahkan moral bangsa. Ketahanan ideologis yang ditopang oleh nilai-nilai Pancasila mencerminkan fondasi moral bangsa yang kokoh dalam menghadapi arus globalisasi dan transformasi digital (Winarno, 2022).

Kollo et al. (2024) menjelaskan bahwa literasi kewarganegaraan merupakan kemampuan dasar yang penting untuk membangun pengetahuan, keterampilan, serta sikap kewarganegaraan. Literasi tersebut membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. Dalam konteks geopolitik digital, literasi kewarganegaraan memiliki peran strategis untuk memperkuat kesadaran ideologis, meningkatkan partisipasi kritis warga negara di ruang digital, dan melindungi bangsa dari penetrasi ideologi asing yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila.



Kedaulatan data menjadi aspek fundamental dalam memperkuat ketahanan ideologis bangsa di era digital. Kemampuan negara untuk mengendalikan aliran data dan melindungi informasi publik mencerminkan kemandirian nasional di tengah kompetisi global berbasis teknologi. Regulasi keamanan siber, infrastruktur digital yang mandiri, serta pendidikan literasi digital bernilai Pancasila perlu diperkuat agar pembangunan teknologi sejalan dengan nilai kebangsaan (Suharno, 2023).

Mendorong terbentuknya masyarakat digital yang beretika merupakan upaya strategis dalam memperkuat persatuan nasional. Etika komunikasi dan kejujuran informasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan dapat menciptakan ruang publik digital yang sehat dan demokratis (Hidayat, 2021). Ketahanan ideologis bangsa hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan digital (Santoso, 2022).

Dimensi Pancasila dalam Kebijakan Geopolitik Nasional

Salah satu hasil penting dari kajian ini adalah bahwa prinsip Pancasila menjadi dimensi utama dalam kebijakan geopolitik Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa pengelolaan wilayah dan sumber daya nasional harus diarahkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Perspektif geopolitik berbasis Pancasila menolak eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal, dan menekankan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, termasuk wilayah terluar dan perbatasan (Hatta, 2018).

Dengan demikian, geopolitik Indonesia bukan hanya instrumen kekuasaan, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan ekonomi, sosial, dan ekologi sesuai dengan sila kelima Pancasila (Suryokusumo, 2017).

Tabel 1. Integrasi Nilai Pancasila dalam Dimensi Geopolitik Nasional

Nilai Pancasila	Dimensi Geopolitik	Implementasi Strategis
Ketuhanan Yang Maha Esa	Etika politik luar negeri	Diplomasi damai dan beradab
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Hubungan antarbangsa	Kerja sama internasional yang humanis
Persatuan Indonesia	Integrasi wilayah	Penguatan Wawasan Nusantara
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan	Tata kelola kebijakan	Musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Distribusi sumber daya	Pemerataan pembangunan nasional

Sumber: Hasil penelitian, 2025.

Relevansi Pancasila dalam Strategi Geopolitik Berkelanjutan

Relevansi Pancasila dalam strategi geopolitik berkelanjutan kajian ilmiah menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menentukan arah geopolitik Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Setiap sila Pancasila menjadi pedoman moral dan dasar normatif untuk kebijakan nasional, agar pembangunan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan



kesejahteraan sosial. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungan, sejalan dengan prinsip keadilan antar generasi. Pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta memastikan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2020; Sukma, 2021).

Geopolitik Indonesia berlandaskan Pancasila menempatkan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari keamanan dan ketahanan nasional. Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab mendorong pemerintah merancang kebijakan berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan juga menuntut penguatan kesadaran warga melalui pendidikan kewarganegaraan, literasi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Kamlasi & Kusdarini (2022) menekankan bahwa literasi kewarganegaraan adalah fondasi penting agar warga negara memahami hak dan kewajibannya serta aktif berperan dalam masyarakat. Kemampuan ini memperkuat identitas kebangsaan, menumbuhkan toleransi, dan membangun kesadaran kolektif, sehingga mendukung kohesi sosial. Literasi kewarganegaraan menjadi strategi utama untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat ketahanan ideologis bangsa di tengah dinamika global.

Pendekatan geopolitik berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila memperkuat diplomasi Indonesia di kancah global. Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi dasar kebijakan luar negeri yang menekankan kerja sama internasional dalam isu lingkungan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Indonesia berpotensi menjadi pelopor diplomasi hijau yang berpijak pada tanggung jawab moral terhadap bumi dan generasi mendatang. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas etis, Indonesia mampu mengembangkan model pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, memperkuat solidaritas sosial, dan mempertahankan keutuhan identitas nasional di tengah globalisasi (Hardiman, 2023; Winarno, 2022).

IV. Penutup

Pancasila memiliki kedudukan sentral sebagai dasar ideologis, moral, dan filosofis dalam pembentukan arah serta strategi geopolitik Indonesia. Relevansi Pancasila dalam geopolitik Indonesia tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk globalisasi digital, perang siber, dan persaingan geopolitik global. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep Wawasan Nusantara menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat solidaritas antarwilayah dalam kerangka negara kesatuan. Nilai keadilan sosial yang menjadi puncak tujuan Pancasila memberikan arah bagi pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi fondasi moral yang memastikan agar kebijakan geopolitik nasional selalu berorientasi pada kemaslahatan bersama, kelestarian lingkungan, dan perdamaian dunia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam geopolitik Indonesia mampu memperkuat ketahanan ideologis bangsa dan menjaga kemandirian di tengah tekanan global. Prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan menjadi dasar bagi diplomasi damai yang menolak hegemoni, sementara prinsip Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial meneguhkan arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai kompas strategis geopolitik memberikan landasan bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan moral di kancah dunia, dengan menempatkan



nilai kemanusiaan universal dan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari strategi keamanan dan kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Efendi, S. (2021). *Kejahatan Pedofilia: Upaya Penanggulangan Dalam Hukum Nasional dan Fiqh Jinayah*. Banda Aceh: PeNa.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hardiman, A. (2023). *Diplomasi hijau dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hatta, M. (2018). *Geopolitik Indonesia: Perspektif Pancasila*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayat, A. (2021). Etika komunikasi digital dan pembangunan masyarakat digital. *Jurnal Teknologi dan Sosial*. <http://www.jurnaltekdos.id/etika-komunikasi-digital> (Diakses 15 Oktober 2025)
- Hukumonline. (2023). PERADI, HKHPM dan AKHI surati Ketua MA soal sumpah advokat. Berita. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhpmand-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (Diakses 11 Mei 2023)
- Kamlasi, A. Y., & Kusdarini, E. (2022). Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam penguatan sikap toleransi siswa SMA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 738–747. <https://doi.org/10.21009/JIPPK.073.04>
- Kamlasi, A. Y., et.al., (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 28-38.
- Kollo, F. L., Tapatab, S. M., Famau, W. W., & Nua Oba, P. F. (2024). Literasi kewarganegaraan sebagai strategi dalam mengembangkan civic knowledge. *Jurnal Lazuardi*, 7(3), 17–21. <https://doi.org/10.53441/jl.Vol7.Iss3.137>
- Latif, M. (2020). *Pancasila sebagai kompas etis*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramli, M. (2019). *Rekonstruksi Pemikiran Kamaruzzaman Bustamam Ahmad: Dari Islam Politik ke Acehnologi 1996-2018*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Ramli, M. (2022). Kontribusi studi kawasan bagi paradigma keilmuan Acehnologi. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 1–20. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/issue/view/80>



- Riyadi, H. (2022). Geopolitik Indonesia dan peran Pancasila dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 112–130.
- Santoso, R. (2022). Kolaborasi pemerintah, pendidikan, dan masyarakat dalam ketahanan ideologis. *Portal Kebijakan Publik*. <http://www.kebijakanpublik.id/ketahanan-ideologis> (Diakses 15 Oktober 2025)
- Suharno, T. (2023). Strategi kedaulatan data dan literasi digital Indonesia. *Hukum dan Teknologi*. <https://www.hukumdigital.id/strategi-kedaulatan-data> (Diakses 15 Oktober 2025)
- Sukma, R. (2021). *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryokusumo, S. (2017). Implementasi wawasan nusantara dalam strategi geopolitik nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 23–40.
- Tillich, P. (1952). Being and love in moral principles of action. In R. N. Anshen (Ed.), *Being and love in moral principles of action* (pp. 15–40). New York, NY: Harper & Bros.
- Wibisono, P. (2021). Globalisasi dan tantangan ideologis terhadap ketahanan nasional. *Jurnal Kajian Strategis*, 6(2), 55–71.
- Wibowo, T. (2020). *Strategi geopolitik nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2022). *Ketahanan ideologis bangsa di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group